



PERBEDAAN KINERJA KONSELOR DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN KONSELING PERORANGAN ANTARA KONSELOR LULUSAN PPK DENGAN KONSELOR YANG BELUM MENEMPUH PPK SE-JAWA TENGAH

Wahyu C. Apriliyanto✉

Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2012

Disetujui Februari 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

Keywords:

Counselor

Individual counseling

Pendidikan profesi konselor

(ppk)

Performance

Abstrak

Layanan konseling perorangan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan kurang optimalnya kinerja Konselor dalam menyelenggarakan layanan konseling perorangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan perbedaan kinerja Konselor antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan konseling perorangan. Populasi penelitian ini adalah semua Konselor SMP, SMA, SMK Negeri Se-Jawa Tengah, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik area sampling. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif persentase dan Uji t-test. Hasil penelitian menunjukkan Konselor lulusan PPK memiliki kinerja dalam kriteria tinggi dan Konselor yang belum menempuh PPK memiliki kinerja dalam kriteria sedang. Hasil Uji t-test menunjukkan terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. Kesimpulannya bahwa kinerja Konselor lulusan PPK termasuk dalam kriteria tinggi, kinerja Konselor yang belum menempuh PPK termasuk dalam kriteria sedang, dan terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara kedua kelompok Konselor tersebut dalam melaksanakan layanan konseling perorangan.

Abstract

The Individual counseling services have to be conducted appropriately to ideal stages and procedures. But in fact, the conducting of individual counseling services by counselors is adverse. This research has special purpose to compare the performance of individual counseling service by counselors who graduated from PPK with counselors who had not taken opportunity in PPK. The population of this research is all counselors in Central of Java who act in junior high school, senior high school and vocational school. The sampling method in this research is the method of area sampling. The method of collecting research data is anonymous questionnaire with closed form. The methods of data analysis are descriptive statistic and t-test. This research results that the performance of individual counseling service by counselors who graduated from PPK is in high level, whereas the performance of individual counseling service by counselors who had not taken opportunity in PPK is in moderate level. From the t-test, the researcher has find the significant difference between the performance of individual counseling service by counselors who graduated from PPK and the performance of individual counseling service by counselors who had not taken opportunity in PPK. The conclusions are the performance of individual counseling service by counselors who graduated from PPK is in high level, whereas the performance of individual counseling service by counselors who had not taken opportunity in PPK is in moderate level and there is significant difference between the performance of individual counseling service.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung A2, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229

E-mail: journalbkunnes@yahoo.com

ISSN 2252-6374

Pendahuluan

Bimbingan dan Konseling merupakan upaya bantuan untuk mewujudkan perkembangan individu secara optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Upaya bantuan tersebut dapat dilakukan secara individual, kelompok, maupun klasikal. Pada pola 17 plus, terdapat layanan konseling perorangan. Prayitno (2004) mengatakan bahwa konseling perorangan merupakan “layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang Konselor terhadap seorang Klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi Klien”.

Konseling perorangan dianggap sebagai “jantung hati” dari pelayanan konseling secara keseluruhan dikarenakan apabila seorang Konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya pelayanan konseling perorangan itu, maka dapat diharapkan seorang Konselor akan dapat menyelenggarakan layanan-layanan bimbingan lainnya dengan tidak mengalami banyak kesulitan. Layanan konseling perorangan ini sendiri apabila diselenggarakan secara tuntas akan dapat mencakup keseluruhan dari fungsi dalam Bimbingan dan Konseling yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, serta pemeliharaan dan pengembangan.

Layanan konseling perorangan secara umum terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut dan laporan (Prayitno, 2004). Adapun pada tahap perencanaan meliputi mengidentifikasi klien, mengatur waktu pertemuan, mempersiapkan tempat dan perangkat teknis, menetapkan fasilitas layanan konseling, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Pada tahap pelaksanaan, dibagi menjadi 3 tahapan yaitu tahap awal (*rapport*, mengadakan penstrukturan, dan kontrak waktu), tahap kegiatan (identifikasi masalah, *diagnosis*, *prognosis*, dan *treatment*), dan tahap akhir (Konselor bersama Konseli membuat kesimpulan, menyusun rencana tindakan, dan melakukan penilaian segera). Pada tahap evaluasi adalah melakukan evaluasi jangka pendek. Tahap analisis hasil evaluasi yaitu menafsirkan hasil konseling. Tahap tindak lanjut terdiri dari menetapkan jenis arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut terhadap pihak terkait, dan melakukan rencana tindak lanjut. Kemudian pada tahap laporan terdiri dari menyusun laporan, menyampaikan laporan kepada pihak terkait dan mendokumentasikan laporan.

Dalam layanan konseling perorangan terdapat juga pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik yang dapat digunakan oleh Konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan

siswa. Agar konseling perorangan dapat diselenggarakan dengan tuntas maka Konselor harus memperhatikan tahapan-tahapan yang ada dan mempunyai keterampilan untuk menggunakan teknik-teknik konseling yang sesuai untuk setiap tahapan proses konseling.

Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan gejala yang belum semuanya sejalan dengan kondisi-kondisi yang digambarkan di atas. Berdasarkan pada pengamatan penulis di sekolah latihan dalam kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan pada saat melakukan observasi untuk tugas kuliah. Ditemukan fakta bahwa Konselor dalam melakukan layanan konseling perorangan tidak terlalu memperhatikan tahapan-tahapan yang ada, sehingga layanan tersebut terkesan seperti ajang pemberian nasehat kepada siswa. Selain itu, Konselor juga tidak menggunakan pendekatan-pendekatan dalam konseling dan tidak terlalu memperhatikan keterampilan-keterampilan dasar dalam konseling perorangan.

Hasil studi mengenai “Kemampuan Guru-Guru Pembimbing SMA Di Jawa Barat Dalam Memberikan Konseling Terhadap Para Siswa” yang dilakukan oleh Maryati (dalam Willis, 2004), diperoleh bukti bahwa, ‘kebanyakan Guru Pembimbing SMA tidak mampu bersama Klien untuk mendefinisikan masalah pada tahap awal konseling, kurangnya keterampilan Guru Pembimbing dalam mengaplikasikan teknik-teknik konseling, Guru Pembimbing tidak mampu dalam membantu pengembangan potensi dan penyelesaian masalah siswa secara tuntas, dan kebanyakan Guru Pembimbing tidak memahami tahapan-tahapan dalam proses konseling individu serta tujuan, isi, dan teknik-teknik konseling yang dapat digunakan pada setiap tahapan tersebut’. Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya kinerja Konselor sekolah dalam menyelenggarakan layanan terutama layanan konseling perorangan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keprofesionalan Konselor, maka diadakannya Pendidikan Profesi Konselor yang disingkat dengan PPK. Hal terkait juga dengan dengan amanat Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa “sebagai seorang pendidik, Konselor dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 yang mencerminkan penguasaan kemampuan akademik di bidang Bimbingan dan Konseling”. Untuk keperluan ini diselenggarakan program S-1 Bimbingan dan Konseling dengan tujuan memfasilitasi pembentukan kompetensi akade-

mik calon Konselor. Selanjutnya, pembentukan penguasaan kemampuan profesional yang utuh sebagai penyelenggara pelayanan ahli Bimbingan dan Konseling yang memandirikan dalam jalur pendidikan formal, diselenggarakan pendidikan profesi berupa latihan dalam menerapkan kompetensi akademik dalam Bimbingan dan Konseling dalam konteks otentik khususnya dalam jalur pendidikan formal.

PPK ini dikuatkan keberadaannya dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Kurikulum program PPK pada dasarnya mengarah untuk penguasaan keterampilan keahlian pelayanan profesional konseling yang diwujudkan dalam bentuk praktik nyata dalam setting pendidikan formal, non formal, maupun informal, serta setting kemasyarakatan lainnya. "Praktik nyata ini didasarkan pada konsep atau teori dan wawasan lapangan yang diperoleh pada program S-1 Bimbingan dan Konseling" (UNP, 2009:15). PPK lebih memusatkan pada melatih keterampilan Konselor dalam melakukan layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling perorangan. Secara teoritik dapat dikatakan bahwa Konselor yang telah menempuh PPK akan mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Konselor yang belum menempuh PPK, dikarenakan Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki sosok utuh sebagai seorang Konselor yang profesional yang mempunyai kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

Penelitian terkait tentang kinerja Konselor yang telah menempuh PPK sampai saat ini belum ada. Apabila ada, penelitian tersebut nantinya dapat dijadikan acuan dasar tentang kondisi sebenarnya yang ada di lapangan mengenai kinerja Konselor PPK yang secara teori memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan Konselor yang belum menempuh PPK. Berdasarkan pada hal tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan profesi Pendidikan Profesi Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor.

Dari paparan yang telah dikemukakan, maka muncul permasalahan pokok yaitu "adakah perbedaan pelaksanaan layanan konseling perorangan yang dilakukan oleh Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK?". Dengan adanya permasalahan pokok tersebut maka rumusan permasalahan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah 1)

bagaimana kinerja Konselor lulusan PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan?, 2) bagaimana kinerja Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan?, 3) Adakah perbedaan kinerja Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan?.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif. Menurut Nazir (2003), "penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Dalam studi komparatif ini, memang sulit untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan, sebab penelitian komparatif tidak mempunyai kontrol".

Terkait dengan penelitian komparatif, menurut Sugiyono (2006), terdapat dua model komparasi yaitu "komparasi antara dua sampel dan komparasi lebih dari dua sampel yang sering disebut komparasi k sampel. Model komparasi dua sampel dibagi menjadi dua jenis yaitu sampel yang berkorelasi (*related*) dan sampel yang tidak berkorelasi (*independent*)". Pada penelitian ini menggunakan sampel independen karena dua sampel yang akan diteliti yaitu Konselor lulusan PPK dan Konselor yang belum menempuh PPK, tidak berkaitan satu sama lain dan tidak diberi perlakuan.

Variabel dalam penelitian ini, terdiri dari dua jenis variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Program pendidikan yang terdiri dari Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling dan PPK. Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan. **Dalam penelitian ini, program pendidikan yang terdiri dari Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling dan PPK sebagai variabel bebasnya (X) mempengaruhi kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan sebagai variabel terikatnya.**

Menurut Sugiyono (2008), "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya". Dalam penelitian ini populasinya adalah Konselor Se-Jawa Tengah, yang memiliki ciri-ciri yaitu Konselor yang bekerja dan masih aktif dalam

memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada peserta didik di sekolah baik SMP, SMA, maupun SMK Negeri Se-Jawa Tengah, hal ini berlaku baik bagi Konselor lulusan PPK maupun Konselor yang belum menempuh PPK.

“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2008). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *area sampling* dan *purposive sampling*. *Area sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Menurut Sugiyono (2006), “teknik *sampling area* sering digunakan melalui dua tahap yaitu menentukan sampel daerah dan menentukan orang-orang yang ada di daerah tersebut secara *sampling juga*”.

Teknik penentuan sampel dengan *sampling area* ini digunakan pada Konselor lulusan PPK dan Konselor yang belum menempuh PPK. Dengan menggunakan teknik *area sampling* ini, terlebih dahulu disusun *sampling frame* yang menggambarkan wilayah Jawa Tengah, kemudian ditentukan wilayah Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai sampel yaitu wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian utara atau terletak pada jalur Pantura (Pantai Utara). Pada wilayah Jawa Tengah bagian utara tersebut diambil secara acak tujuh daerah yang akan digunakan sebagai sampel yaitu Kabupaten Rembang, Pati, Kudus, Demak, Batang, Tegal, dan Kota Semarang.

Untuk sampel Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor diambil dengan teknik *purposive sampling*, teknik sampel ini digunakan dengan tujuan untuk mencari Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor yang masih aktif memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling kepada peserta didik di SMP, SMA, dan SMK Negeri.

Sedangkan, untuk Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor, dikarenakan jumlahnya sangat banyak maka peneliti mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Teknik sampel ini digunakan untuk menentukan sekolah yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan *purposive sampling*, keenam Kabupaten diwakili 1-2 sekolah (akreditasi A) dengan 2-3 Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor yang mempunyai latar belakang Bimbingan dan Konseling.

Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkap variabel yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket. “Metode angket merupakan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diajukan

kepada responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis pula” (Hidayah, 1998).

Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup dengan bentuk jawaban berskala. Angket tertutup merupakan “angket yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang sudah disediakan” (Arikunto, 2006). Angket dengan bentuk jawaban berskala berarti “jawaban berdasarkan pertanyaan disusun berjenjang dalam mana responden diminta menyatakan kebenaran atau penolakan terhadap setiap pertanyaan sikap, sehingga diperoleh gambaran tentang derajat kecakapan, keadaan sikap, dan keadaan diri responden” (Hidayah, 1998).

Validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan ‘tipe validitas yang menunjukkan sejauh mana tes mengungkap suatu konstruk teoritik yang hendak diukur’ (Allen & Yen dalam Azwar, 2006). Dalam hal ini konstruk teoritik yang akan diuji adalah aspek kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan, yaitu menguraikan tentang pelaksanaan tahapan-tahapan dalam konseling perorangan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan (tahap awal, inti, dan akhir), tahap evaluasi, tahap analisis hasil evaluasi, tahap tindak lanjut, dan tahap laporan hasil konseling perorangan. Aitem yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan korelasi antara skor aitem dan skor total aitem. Korelasi ini dihitung dengan menggunakan rumus *Product Moment* dari *Pearson*. Sedangkan, teknik uji reliabilitas yang digunakan dalam pendekatan ini menggunakan formula Alpha.

Diperlukan suatu metode statistik untuk menganalisis suatu data penelitian. Metode statistik yaitu cara-cara ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data penyelidikan yang berwujud angka-angka. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 1) analisis deskriptif persentase (digunakan peneliti untuk mengetahui seberapa besar tingkat kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan baik bagi Konselor lulusan PPK maupun Konselor yang belum menempuh PPK), 2) analisis data kuantitatif (menggunakan analisis statistik parametrik karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data interval, adapun analisis data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi uji normalitas data dengan taraf signifikansi 5%, uji homogenitas, dan uji t-test)

Tabel 1. Distribusi Kinerja Konselor Lulusan PPK dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Secara Keseluruhan

Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase
84%-100%	Sangat Tinggi	4	16%
68%-83,9%	Tinggi	19	76%
52%-67,9%	Sedang	2	8%
36%-51,9%	Rendah	0	0%
20%-35,9%	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		25	100%

Tabel 2. Distribusi Kinerja Konselor yang Belum Menempuh PPK Dalam Melaksanakan Layanan Konseling Perorangan Secara Keseluruhan

Interval	Kriteria	Frekuensi	Persentase
84%-100%	Sangat Tinggi	0	0%
68%-83,9%	Tinggi	12	48%
52%-67,9%	Sedang	13	52%
36%-51,9%	Rendah	0	0%
20%-35,9%	Sangat Rendah	0	0%
Jumlah		25	100%

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui kinerja Konselor lulusan PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan maka akan ditampilkan hasil analisis deskriptif persentase dalam bentuk Tabel 1.

Distribusi frekuensi kinerja Konselor didominasi pada kriteria tinggi dengan frekuensi yaitu 19 Konselor (76%). Sedangkan untuk kriteria sangat tinggi terdapat 4 Konselor (16%) dan kriteria sedang terdapat 2 Konselor (8%). Hal ini berarti Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan.

Tujuan penelitian selanjutnya adalah untuk mengetahui kinerja Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan maka akan ditampilkan hasil analisis deskriptif persentase dalam bentuk Tabel 2.

Distribusi frekuensi kinerja Konselor pada kriteria tinggi dan sedang tidak terpaut jauh, pada kriteria tinggi 12 Konselor (48%) sedangkan untuk kriteria sedang terdapat 13 Konselor (52%).

Hal ini berarti Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan.

Untuk mengetahui perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK digunakan rumus uji beda (t-Test). Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebelum melaksanakan analisis uji t-Test adalah sebagai berikut,

Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas kinerja Konselor lulusan PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil $\chi^2_{tabel} = 7,81 > \chi^2_{hitung} = 1,17$. Hal ini berarti bahwa data tentang kinerja Konselor lulusan PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan berdistribusi normal. Sedangkan uji normalitas kinerja Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan dengan taraf signifikansi 5% diperoleh hasil $\chi^2_{tabel} = 7,81 > \chi^2_{hitung} = 4,25$, berarti bahwa data tentang kinerja Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data

Sumber Variasi	Chi Kuadrat <small>Hitung</small>	Chi Kuadrat <small>Tabel</small>	Kriteria
Konselor lulusan PPK	1,17		Normal
Konselor yang belum menempuh PPK	4,25	7,81	Normal

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji t-Test

Sumber Variasi	Rata-Rata	t_{hitung}	t_{tabel}	Kriteria
Konselor lulusan PPK	368,60	6,37	2,01	$t_{hitung} > t_{tabel}$ = Signifikan berbeda
Konselor yang belum menempuh PPK	318,96			

konseling perorangan berdistribusi normal.

Uji Homogenitas Hasil

Hasil uji homogenitas pada taraf signifikansi 5% diperoleh hasil $F_{hitung} = 1,38 < F_{tabel} = 2,27$, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan kedua kelompok Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK mempunyai varians yang tidak berbeda (homogen).

Uji t-Test

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah “terdapat perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK digunakan rumus uji beda (t-Test). Hasil uji perbedaan terangkum pada Tabel 4

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa hasil analisis uji beda diperoleh $t_{hitung} = 6,37$ apabila dibandingkan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dengan $N=50$ diperoleh t_{tabel} sebesar 2,01, hal ini berarti bahwa $t_{hitung} (6,37) > t_{tabel} (2,01)$ maka diperoleh hasil “ada perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK”. Apabila dilihat dari rata-rata (*mean*) skornya, terlihat bahwa kinerja Konselor lulusan PPK (368,60) lebih tinggi daripada kinerja Konselor yang belum menempuh PPK (318,96). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Konselor lulusan PPK cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan.

Layanan konseling perorangan merupakan salah satu layanan dari Bimbingan dan Konseling yang dianggap sebagai “jantung hati” dari pelayanan konseling secara keseluruhan, maka untuk melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada agar nantinya memperoleh

hasil yang optimal dan tidak terjadi adanya *malpraktik*. Kaitannya dengan peningkatan kompetensi Konselor dalam melaksanakan berbagai layanan Bimbingan dan Konseling maka pemerintah mengadakan PPK agar nantinya para Konselor dapat menjadi tenaga yang benar-benar ahli dan terampil dalam menyelenggarakan layanan-layanan Bimbingan dan Konseling khususnya layanan konseling perorangan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa “ada perbedaan kinerja antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan”. Dari hasil analisis kuantitatif tersebut diketahui bahwa Konselor lulusan PPK memiliki kinerja yang tinggi, sedangkan Konselor yang belum menempuh PPK memiliki kinerja yang masuk kriteria sedang. Jadi dalam hal kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan, kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor lebih baik daripada Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor.

Kinerja Konselor lulusan PPK dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan yang termasuk dalam kriteria tinggi. Hal tersebut dikarenakan Konselor lulusan PPK lebih mengenal dan memahami layanan konseling perorangan. Kurikulum PPK yang lebih menitikberatkan pada praktik di lapangan yang secara khusus ditekankan pada 3 layanan yaitu layanan konseling perorangan, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok yang pelaksanaannya diawasi, dibimbing, dan dimonitring oleh Konselor yang lebih ahli membuat Konselor lulusan PPK telah terbiasa dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara benar sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada dan dalam menggunakan pendekatan-pendekatan serta teknik-teknik yang ada di dalam konseling perorangan. Kinerja Konselor yang belum menempuh PPK yang masuk dalam kriteria sedang dikarenakan penerapan pemahaman yang kurang dari Konselor yang belum menempuh PPK tentang pelaksanaan layanan konseling perorangan. Dalam hal ini terdapat beberapa Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor PPK mengetahui akan prosedur dan teknik

dalam konseling perorangan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diketahuinya.

Berdasarkan kedua gambaran tentang kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan mengikuti PPK dapat lebih meningkatkan kompetensi Konselor sebagai seorang yang ahli dalam bidang Bimbingan dan Konseling baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sebagai dasar bahwa “pendidikan profesional Konselor merupakan program pendidikan berkelanjutan terdiri dari 2 jenjang yaitu program sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling dan jenjang Pendidikan Profesi Konselor atau PPK” (UNP, 2009). Sehingga, tujuan akhir daripada Program Pendidikan Konselor (PPK) ini adalah untuk mencetak Konselor yang tidak hanya menguasai kompetensi akademik tetapi juga menguasai kompetensi profesional. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan layanan konseling perorangan yang dilakukan oleh Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) lebih baik dari Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor baik dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, dan laporan.

Kaitannya dengan perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan, berikut akan diuraikan perbedaan antara kinerja Konselor lulusan PPK dengan Konselor yang belum menempuh PPK dalam melaksanakan tahap-tahap dalam konseling perorangan yaitu sebagai berikut,

Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Perencanaan Pada Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan PPK Dengan Konselor yang Belum Menempuh PPK

Tahap perencanaan dapat dikatakan sebagai tahap pra konseling perorangan atau tahap sebelum pelaksanaan layanan konseling perorangan. Tahap ini terdiri dari mengidentifikasi klien, mengatur waktu pertemuan, mempersiapkan tempat dan perangkat teknis, dan menyiapkan kelengkapan administrasi.

Secara keseluruhan pada tahap perencanaan Konselor lulusan PPK memiliki kinerja yang semuanya masuk dalam kriteria tinggi. Sedangkan kinerja Konselor yang belum menempuh PPK pada tahap perencanaan secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang

atau dengan kata lain Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan tahap perencanaan.

Hal diatas dikarenakan Konselor lulusan PPK telah terbiasa dalam melakukan perencanaan secara baik dan benar sebelum melaksanakan layanan konseling perorangan, yang diperoleh selama mengikuti PPK baik dalam hal melakukan *need assessment* maupun menyiapkan tempat dan kelengkapan administrasi. Sedangkan Konselor yang belum menempuh PPK hanya memfokuskan layanan konseling perorangan pada pelaksanaan saja sehingga tahap perencanaan tidak begitu diprioritaskan dalam konseling perorangan.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, Konselor yang belum menempuh PPK tidak begitu mempersiapkan kelengkapan administrasi seperti menyiapkan lembar *laissez-passer*, lembar resume, maupun mencatat identitas Konseli pada buku atau kartu konseling. Lembar resume hanya digunakan pada tahap akhir setelah Konseli benar-benar terentaskan dari masalah, padahal lembar resume digunakan saat selesai pertemuan Konseling walaupun Konseli belum terentaskan dari masalah sehingga dapat digunakan sebagai pijakan dasar untuk melaksanakan konseling selanjutnya.

Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Pelaksanaan Pada Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan PPK Dengan Konselor yang Belum Menempuh PPK

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti dari layanan konseling perorangan. Dari segi pelaksanaan layanan konseling perorangan, secara keseluruhan kinerja Konselor lulusan PPK pada tahap ini masuk dalam kriteria tinggi.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, pada tahap awal konseling perorangan mereka memiliki kinerja yang tinggi dalam membentuk rapport atau membina hubungan baik terlebih dahulu dengan Konseli, menyelenggarakan penstrukturan baik menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas, dan proses konseling dengan Konseli, maupun mengadakan kontrak waktu sebagai batasan dalam pelaksanaan layanan konseling perorangan. Pada tahap tengah (inti) konseling perorangan mereka memiliki kinerja yang tinggi dalam mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah Konseli secara mendalam, dengan memandang masalah Konseli dari perspektif Konseli bukan hanya dari perspektif Konselor saja sehingga diperoleh informasi-informasi yang mendalam dari

diri Konseli yang dapat digunakan pada tahap prognosis untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dialami oleh Konseli dan memberikan treatment yang sesuai untuk permasalahan Konseli. Hal tersebut juga ditunjang dengan penguasaan terhadap teknik-teknik dan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam layanan konseling perorangan disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh Konseli.

Sedangkan, kinerja Konselor yang belum menempuh PPK pada tahap pelaksanaan secara keseluruhan masuk pada kriteria sedang. Dalam hal ini, Konselor yang belum menempuh PPK memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan tahap pelaksanaan pada layanan konseling perorangan.

Berdasarkan pada hasil analisis kuantitatif, hal tersebut dikarenakan Konselor yang belum menempuh PPK pada tahap awal konseling perorangan, dalam hal membina hubungan baik atau rapport hanya dilakukan pada Konseli yang tidak nakal atau mempunyai banyak skors di sekolah. Pada Konseli yang mempunyai banyak skors cenderung bersikap keras dan pembicaraan langsung pada pokok permasalahan yang dialami oleh Konseli tanpa adanya basa-basi atau penggunaan topik pembicaraan yang netral terlebih dahulu. Dalam menyelenggarakan penstrukturan dan kontrak waktu, Konselor yang belum menempuh PPK memiliki kinerja yang sedang. Hal tersebut dikarenakan penstrukturan dan kontrak waktu tidak begitu penting untuk dilaksanakan, yang terpenting adalah langsung pada permasalahan yang dialami oleh Konseli.

Selain itu, banyak Konselor yang belum menempuh PPK memandang bahwa konseling perorangan adalah ajang pemberian nasihat kepada Konseli. Hal tersebut dikarenakan nasihat mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan menggunakan pendekatan dan tidak menuntut waktu banyak untuk konseling, walaupun tidak sesuai dengan keinginan Konseli.

Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Evaluasi Pada Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan PPK Dengan Konselor yang Belum Menempuh PPK

Tahap evaluasi merupakan tahap setelah pelaksanaan konseling perorangan. Pada tahap ini Konselor lulusan PPK masuk dalam kriteria tinggi, hal ini berarti Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tahap evaluasi dalam konseling perorangan. Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor, setelah konseling berakhir

tetap mengadakan monitoring pelaksanaan rencana tindakan yang telah dilakukan oleh Konseli baik melalui wali kelas, wali murid, teman sebayanya, maupun pada Konseli sendiri.

Pada tahap ini kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor berada dalam kriteria sedang. Hal ini berarti Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan tahap evaluasi pada konseling perorangan.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dalam hal ini terus menerus mendorong Konseli agar dapat mengubah tingkah laku seperti yang Konselor harapkan. Seharusnya hal tersebut dilakukan berdasarkan pada kesepakatan antara Konselor dengan Konseli (diharapkan antara Konselor dan Konseli), walaupun Konselor belum puas dengan perubahan yang terjadi sedangkan Konseli sudah puas atau kehidupan efektif sehari-harinya sudah kembali lagi maka konseling berakhir. Hal ini dilakukan untuk memunculkan sikap kemandirian dari diri Konseli saat menghadapi suatu masalah.

Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Analisis Hasil Evaluasi Pada Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan PPK Dengan Konselor yang Belum Menempuh PPK

Pada tahap analisis hasil evaluasi ini, kinerja Konselor PPK masuk dalam kriteria tinggi. Hal ini berarti Konselor lulusan PPK memiliki kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tahap analisis hasil evaluasi terutama memberikan penilaian terhadap keefektifan rencana tindakan yang dilakukan oleh Konseli terhadap masalah yang dialaminya.

Sedangkan, kinerja Konselor yang belum menempuh PPK masuk dalam kriteria sedang. Hal ini berarti Konselor yang belum menempuh PPK memiliki kinerja yang sedang dalam melaksanakan tahap analisis hasil evaluasi terutama memberikan penilaian terhadap keefektifan rencana tindakan yang dilakukan oleh Konseli terhadap masalah yang dialaminya, karena saat rencana tindakan yang dilakukan oleh Konseli tidak berjalan secara efektif maka Konselor memberikan nasihat kepada Konseli.

Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Tindak Lanjut Dalam Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan Pendidikan Profesi Konselor Dengan Konselor yang Belum Menempuh Pendidikan Profesi Konselor

Kinerja Konselor lulusan PPK dan Konselor yang belum menempuh PPK pada tahap tindak lanjut secara keseluruhan masuk pada kriteria tinggi. Pada tahap tindak lanjut, kinerja Konselor baik Konselor lulusan PPK maupun Konselor yang belum menempuh PPK memiliki kinerja yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kedua kelompok Konselor akan sama-sama melakukan tindak lanjut apabila memang diperlukan adanya tindak lanjut sesuai dengan kesepakatan bersama antara Konselor dan Konseli. Tetapi, dari segi pelaksanaan tindak lanjut, Konselor lulusan PPK akan lebih baik daripada Konselor yang belum menempuh PPK dikarenakan berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada tahap evaluasi dan analisis hasil evaluasi, Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang tinggi sedangkan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor memiliki kinerja yang sedang. Tahap tindak lanjut sangat dipengaruhi oleh tahap evaluasi dan analisis hasil evaluasi, hal ini berarti apabila tahap evaluasi dan analisis hasil evaluasi dilaksanakan dengan baik maka tindak lanjut juga akan berjalan secara baik.

Perbedaan Kinerja Konselor Dalam Melaksanakan Tahap Laporan Dalam Konseling Perorangan Antara Konselor Lulusan PPK Dengan Konselor yang Belum Menempuh PPK

Dari segi pelaporan hasil konseling kinerja Konselor lulusan PPK termasuk kriteria sedang, hal ini disebabkan di beberapa sekolah tidak menuntut Konselornya untuk melaporkan hasil layanan yang telah dilakukan, akan tetapi pada sekolah yang mempunyai Kepala Sekolah yang paham tentang konteks tugas Konselor maka menuntut Konselornya untuk melaporkan hasil dari layanan yang telah dilakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan faktor antar hubungan dan komunikasi antara atasan dan bawahan, menurut Muhlisin dalam www.muhlis.files.wordpress.com (2009) bahwa 'terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor antar hubungan dan komunikasi, hubungan dengan masyarakat, keajahteraan, dan iklim kerja'. Sehingga hal tersebut membuat Konselor ada yang mengerjakan laporan ada yang tidak.

Sedangkan pada Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) termasuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan berdasarkan pada hasil analisis kuantitatif terdapat pemahaman yang keliru dari beberapa Konselor yaitu laporan hasil konseling tidak disampaikan kepada siapapun karena laporan

tersebut adalah berkas penting.

Kaitannya dengan hal tersebut, layanan konseling perorangan harus dilaporkan. Dalam konteks sekolah berarti dilaporkan kepada Kepala Sekolah dan koordinator Konselor. Menurut Nurihsan (2003), salah satu dari kesepuluh konteks tugas Konselor sekolah adalah "mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator Konselor". Selain itu menurut Prayitno (2004), "tahapan yang terakhir dalam konseling perorangan adalah tahap laporan yang terdiri dari menyusun laporan, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikan laporan".

Faktor eksternal juga berpengaruh yaitu faktor antar hubungan dan komunikasi antara atasan (Kepala Sekolah) dengan bawahan (Konselor), untuk Kepala Sekolah yang tidak mengetahui dan memahamai konteks tugas Konselor secara mendalam maka jarang mengawasi atau memonitor tugas pelaksanaan kinerja Konselor di sekolah termasuk dalam melaporkan hasil dari layanan yang telah dilaksanakan. Selain itu dalam melaporkan hasil konseling Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor akan lebih baik jika dibandingkan dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dikarenakan saat pendidikan Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor selalu membuat laporan segera setelah selesai melaksanakan suatu layanan dan diteliti oleh Konselor yang ahli.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian perbedaan kinerja Konselor dalam melaksanakan layanan konseling perorangan antara Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor dapat disimpulkan bahwa kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, sampai pada tahap laporan, termasuk dalam kriteria tinggi dengan perolehan persentase sebesar 78,43%. Kinerja Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan secara keseluruhan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut, sampai pada tahap laporan, termasuk dalam kriteria sedang dengan perolehan persentase sebesar 67,86%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja Konselor lulusan Pendidikan Profesi Konselor

(PPK) dengan Konselor yang belum menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dalam melaksanakan layanan konseling perorangan, hal tersebut berdasarkan pada hasil analisis uji beda dengan menggunakan rumus t-Test diperoleh t_{hitung} sebesar 6,37 yang lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,01 dengan menggunakan taraf signifikansi 5% pada jumlah sampel sebanyak 50 Konselor.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan manuskrip ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Orang Tuaku Tercinta, Dosen pembimbing skripsi yaitu Bapak Mungin Eddy Wibowo dan Bapak Suharso, Rektor Universitas Negeri Semarang sebagai pelindung, penanggung jawab dan pembuat kebijakan berkaitan dengan implementasi publikasi ilmiah di lingkungan universitas, kepada Tim Pengembangan Jurnal, Dekan, Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling, Dewan Penyunting dan *Lay Outer* Jurnal Elektronik Prodi serta Mitra dan pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. 2006. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Hidayah, N. 1998. Pemahaman Individu : Teknik Non Tes. Malang : UNIBRAW Press.
- Muhlisin. 2009. Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan. www.muhtlis.files.wordpress.com. Diunduh tanggal 29 Agustus 2010.
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurihsan, Juntika. 2003. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Bandung: Mutiara Offset.
- Prayitno & Amti, E. 2004. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: P2LPTK Depdikbud.
- Prayitno. 2004. Layanan Bimbingan dan Konseling. Padang: UNP Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
- Sugiyono. 2006. Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research & Development. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2009. Proposal Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional Konselor. Padang.
- Willis, S. S. 2004. Konseling Perorangan (Teori dan Praktek). Bandung: Alfabeta.